

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang penting dari proses pembangunan serta pengembangan wilayah suatu pemerintahan. Perencanaan pembangunan pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintah.¹ Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan pemerintah daerah adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintah. Tujuan yang harus jelas agar mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Agar perencanaan berhasil, diperlukan informasi yang memadai.²

Permasalahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada implementasinya, terutama terkait dengan kelayakan rencana oleh aparatur pelaksana. Masalah kelayakan rencana muncul akibat keterbatasan data statistik dan kemampuan perencanaan tenaga kerja. Selain itu, pada aparatur negara, tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari elite politik serta budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih ada. Perencanaan yang baik harus mampu merinci visi dan misi jangka panjang dengan lebih detail. Penjabaran ini

¹ Novy Setia Yunas, 2017. "Efektivitas E-Musrenbang Di Kota Surabaya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1. Hlm: 2.

² Elfa Safira, 2022. "Pemanfaatan E-Musrenbang dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kelurahan Kota Medan."(Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2020) *Skrripsi*.

membutuhkan pemikiran yang matang agar pembangunan di semua aspek dapat terorganisir dengan baik. Komitmen dari semua elite politik sangat penting untuk keberhasilan program, dan besarnya komitmen tersebut bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.³

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, perluasan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus melampaui instrumen manual dan formal yang selama ini digunakan dalam forum musrenbang. Seiring modernisasi teknologi, penyerapan aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif melalui aplikasi *E-Musrenbang*. *E-Musrenbang* adalah inovasi yang berasal dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi ini diyakini mampu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai tingkatan untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penggunaan sistem *e-musrenbang* tidak hanya meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, tetapi juga berdampak pada pengembangan penganggaran partisipatif. Anggaran, yang berfungsi sebagai perencanaan keuangan organisasi untuk masa depan, merangkum berbagai rencana keuangan. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Penganggaran partisipatif adalah proses penganggaran yang melibatkan masyarakat

³ *Ibid.* Hlm 2

dalam penyusunannya, dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penentuan anggaran pembangunan akan membuat perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih efektif.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui *e-musrenbang* mencakup mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi *e-musrenbang*. Pembangunan dapat dicapai jika pemerintah dan rakyat bekerja sama untuk kesejahteraan bersama, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat mencapai keinginan mereka, sementara pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang diatur oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, berlanjut ke tingkat kecamatan, lalu ke tingkat kabupaten/kota, dan akhirnya di tingkat nasional. Musrenbang yang berjenjang ini diharapkan dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan.⁴

⁴ Rizki Ichwanda, 2022“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan,” (Universitas Medan Area) *Skripsi*.

Musrenbang adalah agenda tahunan bagi warga untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.⁵ Melalui Musrenbang, aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat disalurkan untuk perencanaan pembangunan dan penetapan anggaran. Jalur ini memungkinkan mayoritas aspirasi masyarakat diserap sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Namun, banyak masyarakat yang tidak tahu apakah usulan mereka ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan, atau seberapa besar persentase kegiatan dalam dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi Musrenbang. Sering kali dalam pelaksanaan Musrenbang, dari banyaknya masyarakat yang diundang, hanya beberapa orang yang berani menyampaikan pendapat, sementara sebagian besar lainnya diam, tidak berpendapat, bahkan menginginkan forum tersebut segera berakhir.⁶

Masyarakat sebagai *stakeholder* atau pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat penting agar mereka aktif terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan dan mendukung pembangunan di daerah mereka. Masyarakat dapat memberikan masukan, usulan, dan saran yang konstruktif untuk daerah mereka melalui website *e-musrenbang* dan Aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Laman *e-musrenbang* dapat diakses oleh masyarakat untuk mengajukan usulan pada waktu tertentu sesuai dengan jadwal musrenbang yang ditetapkan oleh

⁵ Fadil Ramadhan. 2023. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Melalui (*E-Musrenbang*)," *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1. Hlm: 2.

⁶ Rohmatulloh Lailatun. 2018. "Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Musrenbang* Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan: Penganggaran Partisipatif Sebagai Variabel Pemoderasi". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 7 (1). Hlm 2.

pemerintah, yang berlangsung pada periode tertentu setiap tahunnya. Sementara itu, usulan insidental sepanjang tahun dapat disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah melalui Aplikasi JAKI.

Masyarakat dapat membuat musrenbang lebih efektif sehingga keberhasilan program yang diterapkan dapat dilihat dan dikembangkan dengan melihat Indikator keberhasilan *e*-musrenbang Jakarta mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, seperti jumlah usulan musrenbang yang masuk melalui *e*-musrenbang. Selain itu, efisiensi dan efektivitas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses musrenbang, biaya yang dikeluarkan, serta tingkat akurasi informasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam keterbukaan informasi tentang proses musrenbang kepada masyarakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses musrenbang juga menjadi indikator keberhasilan. Dampak dari keberhasilan ini meliputi peningkatan kualitas pembangunan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

E-Musrenbang di Jakarta dimulai pada tahun 2012. Pada saat itu, *e*-musrenbang masih dalam tahap pengembangan dan hanya digunakan di beberapa kelurahan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, musrenbang terus diperbarui dan disempurnakan. Pada tahun 2015, *e*-musrenbang mulai diterapkan secara menyeluruh di seluruh kelurahan di Jakarta. Saat ini, *e*-musrenbang telah menjadi platform utama bagi masyarakat Jakarta untuk menyampaikan usulan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka layanan *e*-musrenbang sebagai bagian dari penerapan *e-government*,

yang dapat diakses di <http://musrenbang.jakarta.go.id/>.⁷ Laman tersebut menyediakan halaman untuk input usul melalui Rembuk RW (Rukun Warga) dimana usulan diunggah oleh pengurus RW mirip seperti musrenbang konvensional. Dasar hukum penyelenggaraan *e*-musrenbang diantaranya adalah Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/SE/2015 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Kota Atau Kabupaten Administrasi Tahun 2015 dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Pada tahun tersebut, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aplikasi *e*-musrenbang yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 1.1
Perbedaan *E*-Musrenbang dan Musrenbang

<i>E</i>-Musrenbang	Musrenbang
Usulan diajukan secara online melalui platform digital, lebih luas dan lebih mudah.	Usulan biasanya diajukan secara langsung dalam rapat atau pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW.
Sistem digital, akses ke informasi dan proses lebih transparan dapat diakses oleh masyarakat	Proses konvensional dan terbatas pada partisipasi fisik yang membatasi aksesibilitas
Mempercepat proses pengajuan dan pengolahan usulan karena data langsung terinput ke dalam sistem	Proses memakan waktu yang lama karena harus melalui tahapan rapat dan pertemuan
Semua dokumentasi dilakukan secara digital, memudahkan monitoring pelaksanaan usulan	Dokumentasi secara manual dan memerlukan arsip fisik

Sumber: data diolah peneliti 2024

⁷ “Musrenbang DKI Jakarta.” Diakses Pada 1 Desember 2023 Pukul 01.14 WIB.

Menurut tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara *e-musrenbang* dan *musrenbang*. Perbedaan tersebut terdapat dari proses yang lebih efisien menggunakan *e-musrenbang*. Masyarakat lebih mudah dalam menggunakan *e-musrenbang* karena tanpa perlu ikut rapat atau pertemuan dapat memantau serta mengajukan usulan yang diberikan. Manfaat dari *e-musrenbang* yaitu masyarakat dapat mengajukan usulan pembangunan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi pertemuan, serta partisipasi menjadi lebih inklusif.

Pada tahun 2023, pengguna *e-musrenbang* meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 1 juta pengguna tercatat menggunakan platform ini di Jakarta, menurut data dari situs web *musrenbang* Jakarta. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk melihat dan melacak usulan pembangunan daerah. *E-musrenbang* sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pembangunan.⁸

Pengguna *e-musrenbang* terbanyak tahun 2023 yaitu provinsi Jawa Barat yang menjadi provinsi acuan dalam penggunaan sistem ini. Pada tahun 2023, lebih dari 5 juta pengguna telah menggunakan *e-musrenbang* di Jawa Barat dan terbanyak yaitu DKI Jakarta. Pengguna *e-musrenbang* DKI Jakarta dapat dikatakan terbanyak karena hampir setiap masyarakat mengerti dengan penggunaan *e-musrenbang* yang membuat DKI Jakarta mendapat pengguna dan pembangunan terbanyak di Indonesia.

⁸ *Ibid.*

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu turut serta dalam kegiatan musrenbang, yang membawa dampak pembangunan berkelanjutan dan bisa menyetarakan warga Kepulauan Seribu Utara. Dalam musrenbang tahun 2023, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mengajukan 63 usulan yang dibahas dan diakomodir untuk tahun 2023. Usulan tersebut terdiri dari 47 usulan fisik, 14 usulan non-fisik, dan 2 usulan barang.⁹ Berbanding terbalik dengan Provinsi Papua yang menjadi pengguna *e-musrenbang* terendah di Indonesia. Faktor yang menjadi terendahnya penggunaan *e-musrenbang* yaitu ketidakmerataan akses internet yang menyulitkan masyarakat untuk menggunakan *e-musrenbang*. Selanjutnya faktor sosialisasi yang kurang gencar dilakukan, sehingga masyarakat belum mengetahui manfaat dan cara menggunakannya.¹⁰

E-musrenbang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui sistem online. Usulan tersebut kemudian akan diverifikasi oleh pemerintah daerah dan dibahas dalam forum Musrenbang. Pada tahun pertama pelaksanaannya, *e-musrenbang* berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 usulan dari masyarakat. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan dibahas dalam forum Musrenbang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan swasta. Terdapat *timeline* pelaksanaan *e-musrenbang* di Jakarta tahun 2023.

⁹ Achmad Marzoeki. 2022. "Bupati Kepulauan Seribu Membuka Musrenbang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara". <https://jakarta.hallo.id/metropolitan/pr-2302623299/bupati-kepulauan-seribu-membuka-musrenbang-kecamatan-kepulauan-seribu-utara>. Diakses pada 27 Februari 2024 pukul 02.04 WIB.

¹⁰ Musrenbang Jakarta. "Sistem Informasi Musyawarah Rencana Pembangunan". <https://musrenbang.jakarta.go.id/>. Diakses pada 15 Februari 2024 pukul 20.28 WIB.

Tabel 1.2
Timeline Pelaksanaan E-Musrenbang di Jakarta Tahun 2023

Tahapan	Tanggal	Kegiatan
Pembukaan	1 Januari 2023	Pembukaan aplikasi <i>e-musrenbang</i>
Rembuk RW	4-21 Januari 2023	Masyarakat menyampaikan usulan pembangunan melalui aplikasi <i>e-musrenbang</i>
Musrenbang Kelurahan	14 Februari - 1 Maret 2023	Camat dan Lurah memverifikasi usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi <i>e-musrenbang</i>
Musrenbang Kecamatan	8-15 Maret 2023	Camat dan Lurah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembangunan kepada Walikota/Bupati
Musrenbang Kota/Kabupaten	14-21 Maret 2023	Walikota/Bupati menyampaikan hasil verifikasi usulan pembangunan kepada Gubernur
Musrenbang Provinsi	21 April – 2 Mei 2023	Gubernur menetapkan prioritas pembangunan daerah

Sumber: E- Musrenbang Jakarta

Pembukaan aplikasi *e-musrenbang* dilakukan pada tanggal 1 Januari 2023. Masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan melalui aplikasi *e-musrenbang* mulai tanggal 4 Januari 2023. Usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi *e-musrenbang* kemudian akan diverifikasi oleh camat dan lurah pada tanggal 14 Februari-1 Maret 2023. Hasil verifikasi usulan pembangunan kemudian disampaikan oleh camat dan lurah kepada Walikota/Bupati pada tanggal 8-15 Maret 2023. Walikota/Bupati kemudian menyampaikan hasil verifikasi usulan pembangunan kepada Gubernur pada tanggal 14-21 Maret 2023. Gubernur kemudian menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tanggal 21 April-2 Mei 2023. Kemudian pada tanggal 14 Februari sosialisasi musrenbang

terintegrasi kecamatan tahun 2023. Musrenbang Kecamatan Terintegrasi bertujuan menyampaikan arahan prioritas pembangunan Jakarta Tahun 2024 dan informasi rancangan rencana kerja kecamatan dan kelurahan. Setelah itu akan dilaksanakan survei teknis, verifikasi, pembahasan, dan validasi terhadap usulan dari Rembuk RW Tahun 2023 yang sudah ada melalui sistem *e-musrenbang*.

Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memudahkan akses data pemerintah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang mewajibkan pemerintah menjadi pelayanan yang baik. Istilah *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan *e-government* sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Karena sebagai tujuan pemerintah pusat yaitu menjadikan pelayanan publik yang integritas, melayani, dan menyelesaikan berbagai masalah di DKI Jakarta.

Masyarakat DKI Jakarta sudah melalui perkembangan teknologi digital dari masa ke masa. Masyarakat diwajibkan untuk melek teknologi, karena zaman semakin berkembang tiap tahunnya. Masyarakat yang terhubung melalui teknologi digital, memudahkan masyarakat dalam berkembang serta dapat menggunakan teknologi dengan baik. *Digital Society* yang membuat masyarakat terhubung dengan digital *e-musrenbang*. Masyarakat jadi mudah dalam melaksanakan proses musrenbang karena dengan adanya *e-musrenbang* masyarakat jadi mudah dalam melakukan proses perencanaan pembangunan. Berarti, konsep dari *e-government* dan *digital society* dalam hubungan efektivitas yaitu dengan adanya kedua konsep

tersebut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah digunakan oleh masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik yang memberikan akses besar terhadap informasi pemerintah yang meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat melihat perkembangan proses perencanaan pembangunan.

Penelitian yang terkait implementasi kebijakan *e-musrenbang* yang pertama penelitian dari Fadli Ramadhan tahun 2022.¹¹ Dalam penelitian tersebut *e-musrenbang* sudah berjalan dengan baik, karena usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi langsung diseleksi oleh Bapedda sesuai kriteria dan direalisasikan. Selanjutnya, penelitian dari Novy Setia Yunas 2017 yang berjudul “Efektivitas *e-musrenbang* di Kota Surabaya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat”.¹² Sistem tersebut berhasil diterapkan di Surabaya karena menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang di Surabaya. Masyarakat harus dijadikan subjek pembangunan dalam *e-musrenbang* bukan objek saja.

¹¹ Fadil Ramadhan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Melalui (*e-musrenbang*),” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1 (2023): 2.

¹² Novy Setia Yunas. 2017. “Efektivitas *E-musrenbang* di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 7 (1). Hlm 1.

Penelitian yang dilakukan dengan Devi Damayanti, Mas Halimah, Budiman Rusli Tahun 2021¹³ dengan judul “Implementasi Kebijakan Aplikasi E-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*e-musrenbang*) Kecamatan Cibiru Kota Bandung”. Terdapat kerjasama antara Bappetlitbang Kota Bandung, akademisi alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), dan relawan *e-musrenbang*. Namun dalam praktiknya masih menghadapi permasalahan tentang Bappetlitbang Kota Bandung dalam menurunkan digital divide diantara para *user e-musrenbang*. Pada penelitian ini peneliti juga mengkaji terkait efektivitas *e-musrenbang* dengan melihat fenomena mengenai keberhasilan program, kepuasan terhadap program, keberhasilan sasaran, tingkat input output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2023, Musrenbang mengidentifikasi 6 isu strategis utama yaitu, penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan penurunan stunting. Sistem *e-musrenbang* mencatat 1.059 usulan dengan total anggaran sebesar 972 Miliar Rupiah. Di sisi lain, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 5 program prioritas utama, yaitu Penanggulangan Banjir, Penurunan Stunting, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penanggulangan Kemiskinan, dan Penataan Kawasan. Selain itu, Walikota

¹³ Budiman Rusli Devi Damayanti, Mas Halimah, “Implementasi Kebijakan Aplikasi E-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*E-Musrenbang*) Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung,” *Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 2 (2021): 5.

Jakarta Pusat juga menambahkan program prioritas lainnya, yakni peningkatan kebersihan kota dan penguatan program penghijauan.¹⁴

Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan sosialisasi Musrenbang Kecamatan Teintegrasi tahun 2023. Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi dimulai pada 14 Februari 2023. Pada Sidang Pleno 1 di kecamatan untuk memberikan arahan dalam sidang kelompok di kelurahan. Musrenbang Kecamatan Terintegrasi bertujuan menyampaikan arahan prioritas pembangunan Jakarta Tahun 2024 dan informasi rancangan rencana kerja kecamatan dan kelurahan. Setelah itu akan dilaksanakan survei teknis, verifikasi, pembahasan dan validasi terhadap usulan dari Rembuk RW Tahun 2023 yang sudah ada melalui sistem *e-musrenbang*.

Musrenbang Kecamatan Kemayoran mendapatkan 218 usulan warga dari 8 kelurahan yang dilihat melalui *website e-musrenbang Jakarta*. Skala prioritas kebutuhan warga dari rembuk RW yang akan dibawa ke tingkat kota. Terdapat dua kelurahan yang belum mempunyai Puskesmas yang menjadi usulan penting untuk disampaikan ke tingkat kota. Menurut Walikota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan¹⁵

“Hasil Musrenbang Kecamatan Kemayoran berintegrasi Musrenbang Kelurahan merupakan salah satu wilayah pengusul usulan non fisik terbanyak Jakarta Pusat. Sidang pleno II Musrenbang Kecamatan berlangsung dengan lancar serta dapat menampung seluruh usulan yang diajukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menjadi keputusan bersama.”

¹⁴Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023. <https://bappeda.jakarta.go.id/musrenbang-kota-administrasi-jakarta-pusat-tahun-2023/>. Diakses pada 27 Februari 2024 pukul 02.20 WIB.

¹⁵ Fari K. 2023. “Plt Wakil Walikota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin: Dari Usulan Warga Hasil Musrenbang Kecamatan Kemayoran Usulan Non Fisik Terbanyak”. <https://progresifjaya.id/plt-wakil-walikota-jakarta-pusat-iqbal-akbarudin-dari-usulan-warga-hasil-musrenbang-kecamatan-kemayoran-usulan-non-fisik-terbanyak/>. Diakses pada 26 Februari 2024 pukul 16.58 WIB.

Musrenbang tahun 2023 ini melibatkan forum anak Jakarta, forum perempuan dan forum penyandang disabilitas untuk memberikan usulan-usulan dalam rangka perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Musrenbang Kecamatan terintegrasi kelurahan tahun 2023 juga dihadiri Danramil 0501 Kemayoran, Kapolsek, Kasudin Sosial Abdul Salam, Kasatpol PP Asmar, para Kasatpel, Kasektor Dukcapil H.Fredy Prasetya, para Lurah, Ketua RW, LMK, FKDM.

Keberhasilan *e*-musrenbang dalam melibatkan masyarakat dalam proses musrenbang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dukungan politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, partisipasi masyarakat, teknologi, dan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan *e*-musrenbang. Meskipun *e*-musrenbang telah menunjukkan keberhasilan program serta tepat sasaran program.¹⁶ Pada tahun 2017, DKI Jakarta meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Anugerah Pangripta Nusantara 2017, di mana DKI Jakarta dinyatakan sebagai Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan, dan peringkat II sebagai Provinsi dengan Perencanaan Terbaik.¹⁷

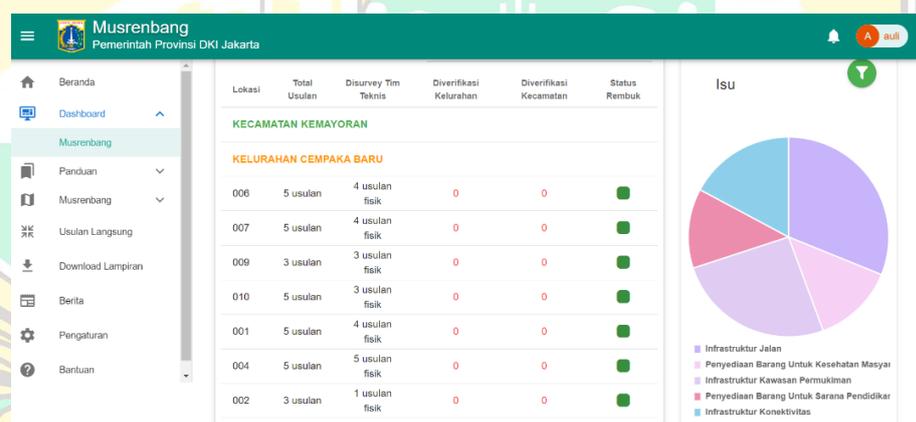
¹⁶ Fadil Ramadhan, 2022 “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Melalui (*E*-Musrenbang),” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1. Hlm 35.

¹⁷ Lily Rusna Fajriah. 2017. “Pemprov DKI Dapat 2 Penghargaan di Anugerah Pangripta Nusantara 2017.” <https://metro.sindonews.com/berita/1200340/171/pemprov-dki-dapat-2-penghargaan-di-anugerah-pangripta-nusantara-2017>. Diakses pada 27 Februari 2024 pukul 03.29 WIB.

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah sangat bergantung pada kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan. Perencanaan yang baik memberikan arah yang jelas mengenai kebutuhan warga dalam periode tertentu, serta menetapkan target yang terukur untuk semua kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Namun, di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan, program e-musrenbang mengalami kegagalan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan, yang membuat masyarakat kurang memahami cara menggunakan aplikasi dan manfaatnya. Akibatnya, rendahnya tingkat partisipasi menghambat proses musrenbang di kelurahan tersebut.¹⁸

Gambar 1.1

Jumlah Usulan Salah Satu Kelurahan Kecamatan Kemayoran



Sumber : website e-musrenbang Jakarta

Gambar diatas salah satu contoh kecamatan yang menunjukkan contoh usulan dari Kecamatan Kemayoran Kelurahan Sumur batu memiliki 19 usulan yang sedang proses verifikasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 10 sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan

¹⁸ Debby Winda Anelda. 2021. "Pendayagunaan Program Aplikasi E-Musrenbang dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Politik*. Vol 1 Nomor 4. Hlm 1-12.

hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta. Sasaran pembangunan tersebut seperti pengurangan ketimpangan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat, penurunan kesenjangan, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas dan harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, akselerasi digital, peningkatan kesempatan, pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan, dan pembangunan infrastruktur.¹⁹

Website e-musrenbang mencatat setiap usulan atau aspirasi masyarakat yang telah dibahas dalam Rembuk Rukun Warga (RW) serta melacak perjalanan usulan tersebut melalui berbagai fase perencanaan, dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengguna *e-musrenbang* terus meningkat. Saat ini, terdapat 1.223.784 pengguna *e-musrenbang*, dengan total 11.921 usulan dan anggaran sebesar 1,8 triliun Rupiah.²⁰ Data ini menunjukkan bahwa *e-musrenbang* berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Jakarta. Pada tahun 2022, jumlah pengguna *e-musrenbang* masih sekitar 1 juta orang, dan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, jumlah usulan yang diterima juga bertambah.²¹

¹⁹ CNN Indonesia, “Anies: Pemprov DKI Tetapkan 10 Sasaran Pembangunan Tahun 2023,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328204953-20-777207/anies-pemprov-dkitetapkan-10-sasaran-pembangunan-tahun-2023>. Diakses pada 22 November 2023 Pukul 22.59 WIB.

²⁰ Fransiskus Wisnu Wardhana Dany. 2024. “Realisasi APBD DKI Jakarta Optimal, Masih Dominan Belanja Aparatur”. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/09/realisasi-apbd-dki-jakarta-optimal-masih-dominan-belanja-aparatur>. Diakses pada 24 Januari 2024 pukul 21.41 WIB.

²¹ Musrenbang Jakarta. “Sistem Informasi Musyawarah Rencana Pembangunan”. <https://musrenbang.jakarta.go.id/>. Diakses pada 24 Januari 2024 Pukul 21.04 WIB.

Keberhasilan program *e-musrenbang* dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitasnya. Penelitian menunjukkan bahwa sasaran program *e-musrenbang* telah sesuai dengan yang diharapkan, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem ini untuk masyarakat. Teknologi dalam pemerintahan memberikan informasi dan pelayanan kepada warga yang membutuhkan interaksi dengan pemerintah. Meskipun masyarakat biasanya terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, keterlibatan mereka sangat berguna untuk keberlangsungan program. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan penting untuk menyuarakan aspirasi dan menangani masalah yang ada. *E-Musrenbang* di Jakarta, yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016, mencerminkan penerapan ini.²²

Efektivitas *e-musrenbang* juga bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem ini. Keberhasilan program bisa dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian di suatu daerah. Kecamatan Kemayoran menjadi kecamatan dengan jumlah usulan tertinggi di DKI Jakarta. Penelitian ini berasumsi bahwa *e-musrenbang* di Kecamatan Kemayoran telah berhasil, karena ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah usulan dan pengguna, serta kemajuan pembangunan yang sudah berlangsung di kecamatan tersebut.

²² Jakarta Smart City, "Partisipasi Warga Untuk Jakarta Lewat *E-Musrenbang*," last modified 2018, <https://kumparan.com/jakarta-smart-city/partisipasi-warga-untuk-jakarta-lewat-e-musrenbang-1515573649384/2>. Diakses Pada 20 Desember 2023 Pukul 19.27 WIB.

Keberhasilan sistem ini dapat diukur dengan tujuan yang akan dicapai dan ditetapkan serta dengan kepuasan program dan keberhasilan sasaran *e-musrenbang* di Kecamatan Kemayoran. Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana dalam melihat efektivitas *e-musrenbang* yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan yang digunakan kecamatan dan kelurahan dalam menginput usulan. Berdasarkan penjelasan di atas maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana Efektivitas Penggunaan *E-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang)* di Kecamatan Kemayoran Tahun 2023?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Efektivitas Penggunaan *E-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang)* di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tekhusus Ilmu Politik yang berkaitan dengan efektivitas Penggunaan *e-musyawarah perencanaan pembangunan*.

Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan terkait efektivitas *e-musrenbang* di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Tahun 2023.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai Efektivitas Penggunaan *e-Musyawah* Perencanaan Pembangunan (*e-musrenbang*) di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Tahun 2023.

